Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana yang dibutuhkan dalam suatu lembaga pemerintahan untuk membantu dalam proses pengolahan data. Menjadi keharusan data diolah secara terkomputerisasi. Hal itu dikarenakan pengolahan data secara terkomputerisasi dapat memberikan kontribusi yang besar untuk meningkat kinerja suatu lembaga pemerintahan, hal ini terkait dengan kecepatan, keakuratan dan ketepatan data yang di hasilkan. Jika dibandingkan pengolahan data secara manual, pengolahan data secara terkomputerisasi memiliki kelebihan mengolah data dengan cepat dan dalam sekala yang lebih besar.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat dengan BPKP, adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggara akuntabilitas didaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.

Dalam menjalankan tugasnya di Perwakilan BPKP Provinsi Riau terdapat 6 (enam) bagian yaitu bagian tata usaha (TU), korwas instansi pemerintah pusat (IPP), korwas akuntabilitas pemerintah daerah (APD), korwas akuntan negara (AN), korwas investigasi dan korwas prolap dan pembinaan APIP (P3A) dimana setiap bidang melukakan pengawasan sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh BPKP baik itu merupakan program kerja tahunan dari BPKP ataupun merupakan permintaan dari Pemda/Instansi Pemerintah/ BUMN atau BUMD.

Mulai dari tahun 2000 sampai sekarang, dalam 1 (satu) tahun kurang lebih terdapat 500 sampai 700 surat tugas (ST) pengawasan yang terbit di Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan itu juga menandakan banyaknya jumlah laporan hasil pengawasan (LHP) yang ada, dimana 30% dari laporan tersebut bersifat audit dan 70% bersifat non audit, yang menghasilkan 150 sampai 210 LHP bersifat audit dan 350 sampai 490 LHP bersifat non audit. Jenis-jenis laporan pengawasan non audit diantaranya yaitu evaluasi, monitoring, review, sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), asistensi, sosialisasi, pemdampingan dan konsultasi.

Dalam mengelola data LHP Perwakilan BPKP Provinsi Riau telah memiliki sistem yang disebut Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIMHP). Akan tetapi sistem ini hanya dapat mengolah data LHP yang bersifat audit, sedangkan LHP yang bersifat nonadit belum ada sebuah sistem yang mengelola, oleh karena itu data LHP non audit masih berupa laporan pengawasan hardcopy yang tersimpan didalam lemari, tanpa terkoordinasi dengan baik sehingga data yang begitu banyak dari hasil pengawasan sulit untuk dimonitor apakah rekomendasi yang telah diberikan ditindaklanjuti atau belum. Hal ini membuat pimpinan kesulitan dalam memeriksa hasil rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. Belum terpusatnya pengolahan data ini juga mempersulit dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), karena harus memindahkan data pada setiap file dan disusun kembali ke dalam format yang ada. Hal ini membuat proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan LAKIP menjadi lama, untuk menyusun laporan kinerja triwulanan membutuhkan waktu 5 hari dan untuk menyusun LAKIP membutuhkan waktu 3 minggu.

Belum adanya pusat pengolahan data sehingga sulit memonitoring hasil rekomendasi yang diberikan apakah telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait atau belum, selama ini untuk mengetahui apakah rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti atau belum, kita harus mengecek ulang surat balasan dari instansi terkait mengenai tindaklanjut dari rekomendasi yang diberikan. Untuk mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah dari rekomendasi yang telah ditindaklanjuti kita harus mengecek setiap rekomendasi dan tindaklanjut dan menjumlahkannya kembali, sehingga memakan waktu yang lama untuk mengetahui jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjut.

Berdasarkan permasalahan tersebut untuk mempermudah pimpinan dalam mengelola data LHP non audit maka penulis memberikan usulan dengan merancang sistem informasi manajemen hasil pengawasan non audit. Sistem ini dibangun untuk mempermudah, mempercepat dan mengakuratkan proses pengolahan data LHP non audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul **"Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan Non Audit (Studi Kasus : Perwakilan BPKP Provinsi Riau)".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diambil adalah "*Bagaimana membangun dan implementasi sistem informasi manajemen hasil pengawasan non audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau*".

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1) Sistem informasi yang di bangun hanya mengolah data LHP Non Audit yang ada pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
2) Pengguna (*user*) dari sistem ini terdiri dari admin, operator korwas, kepala korwas, kepala perwakilan dan inspektorat/tamu.
3) Perancangan sistem menggunakan metode *Objcet Oriented Analysis Diagram* (OOAD) dengan menggunakan *tools UML* yang meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4) Pengembangan sistem yang akan dibangun menggunakan metode *waterfall*.
5) Sistem informasi yang akan dibangun berbasis Web.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk membantu kinerja BPKP dalam melakukan proses pengolahan data LHP Non Audit.
2) Untuk membantu BPKP dalam merekap hasil temuan dan tindak lanjut dari LHP Non Audit yang digunakan untuk menyusun laporan Kinerja Triwulanan dan LAKIP.

1.5. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Dapat mempermudah proses pengolahan data LHP Non Audit di Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
2) Dapat mempermudah proses perekapan hasil temuan dan tindak lanjut dari LHP Non Audit untuk penyusunan laporan Kinerja Triwulanan dan LAKIP di Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
3) Dapat membantu pimpinan dalam memonitoring rekomendasi yang telah diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Riau kepada instansi terkait.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun supaya dalam penulisan laporan penelitian tugas akhir lebih teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berikut sistematika penulisan penelitian Tugas Akhir ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori tentang materi penelitian yang berasal dari jurnal, buku serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan tugas akhir ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang rencana, langkah dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian tugas akhir, mulai dari tahap awal yaitu tahap perencanaan, pengumpulan data sampai tahap akhir yaitu tahap dokumentasi.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi penjelasan tentang analisa dan perancangan sistem informasi manajemen hasil pengawasan non audit. Perancangan input, basis data, struktur menu, serta perancangan interface. Perancangan system menggunakan teknik OOAD (*Object Oriented Analysis Design*), Tools UML (*Unified Modelling Languange*) dan metode pengembangan system menggunakan metode *waterfall*.

BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisi tentang pengujian perangkat lunak menggunakan teknik *blackbox testing*, dan menjelaskan tentang implementasi dari perancangan sistem informasi manajemen hasil pengawasan non audit.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil dari penelitian tugas akhir yang telah dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Riau.